Pengelolaan dan Optimalisasi BOSP 2025/2026

Strategi Data, Transformasi Digital, dan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
Anggota Komisi X DPR RI

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Filosofi & Transformasi BOSP

BOSP bukan sekadar dana rutin.
Ini adalah instrumen pemerataan akses.

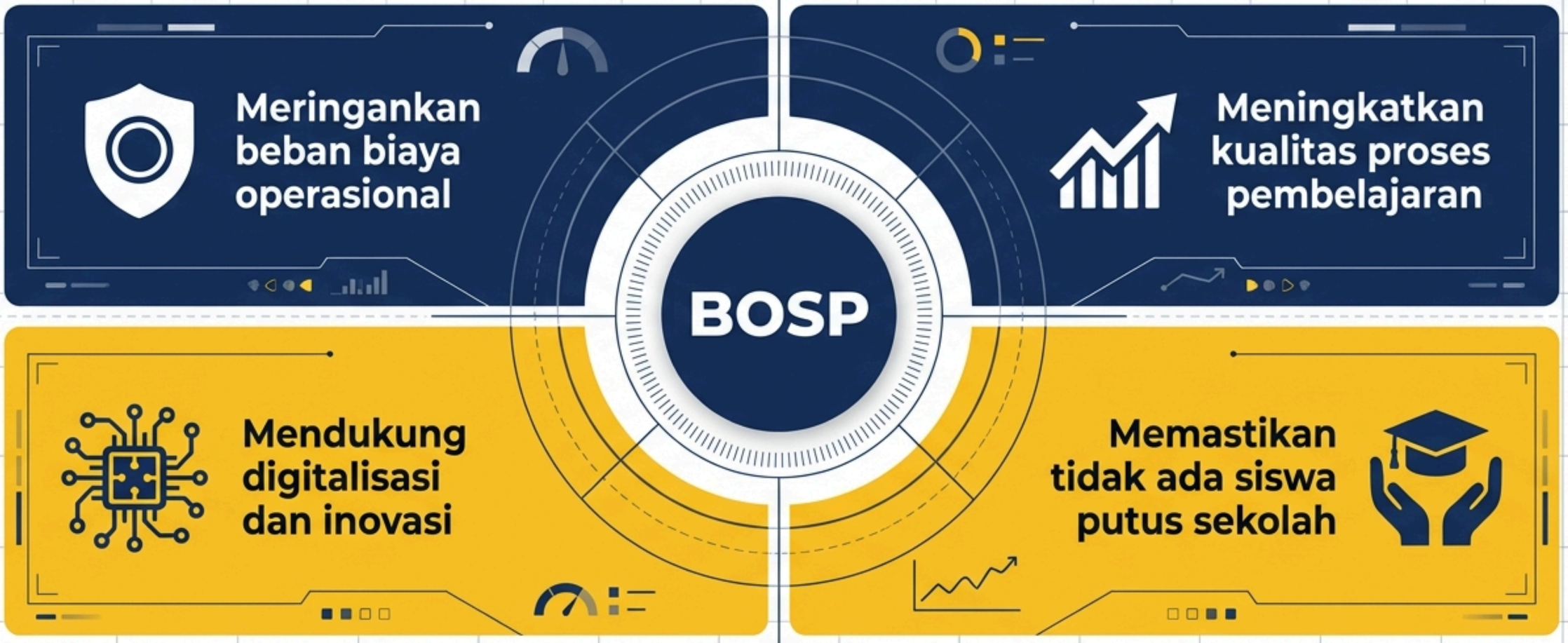

Peran Strategis Komisi X DPR RI

Pendidikan Bermutu

Legislasi

- Revisi UU Sisdiknas
- Standardisasi Mutu
- Regulasi BOSP inklusif

Anggaran

- Peningkatan dana per siswa
- Persetujuan RKA 2026
- Evaluasi *mandatory spending* 20%

Pengawasan

- Panja Daerah 3T
- RDP Kementerian
- Serap aspirasi langsung

Tren Nasional & Forecast Anggaran 2025-2026

Rekor Kecepatan!

96% dana BOSP 2024 tersalurkan di bulan Januari.

Rp16,9 Triliun

Fokus: Revitalisasi Fisik

Rp2 Triliun

Fokus: Smart Classroom & Transformasi Digital

2026: Kembalinya skema BOSP Afirmasi & Kinerja untuk daerah terpencil dan program AI/Coding.

Peta Alokasi Dana BOSP Reguler per Siswa (Estimasi 2025/2026)

Matriks Komparasi Ketentuan Penggunaan Dana

Komponen	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta
Pembayaran Honor	Maksimal 20%	Maksimal 40%
Penyediaan Buku	Minimal 10%	Minimal 10%
Pemeliharaan Sarpras	Maksimal 20%	Maksimal 20%
BOP PAUD (Buku)	Minimal 5%	Minimal 5%

5 Prinsip Emas Pengelolaan BOSP

Fleksibilitas: Dana disesuaikan dengan kebutuhan riil, tidak kaku.

Efektivitas: Setiap rupiah berdampak langsung pada hasil belajar.

Efisiensi: Output optimal, hindari pemborosan kegiatan minim dampak.

Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum & administratif.

Transparansi: Keterbukaan informasi via portal digital atau papan sekolah.

Siklus Pengelolaan Berbasis Digital

Perencanaan Berbasis Data (PBD) - Berhenti Menebak Kebutuhan

Jika masalah utama di literasi digital, alokasikan untuk software edukasi, bukan pengecatan pagar sekolah.

Contoh Alokasi BOSP Inovatif & Berdampak Tinggi

Kapasitas Digital

Lokakarya penciptaan konten, pelatihan jurnalistik dasar, langganan software edukasi.

Budaya Lokal & Profil Pancasila

Pelestarian seni daerah: Pembuatan Wayang Beber, pelatihan membatik, pementasan Tari Kethek Ogleng.

Infrastruktur TIK

Perawatan lab komputer, perangkat jaringan Asesmen Nasional, akses internet berkecepatan tinggi.

Spotlight: Ekosistem BOSP di Jawa Tengah

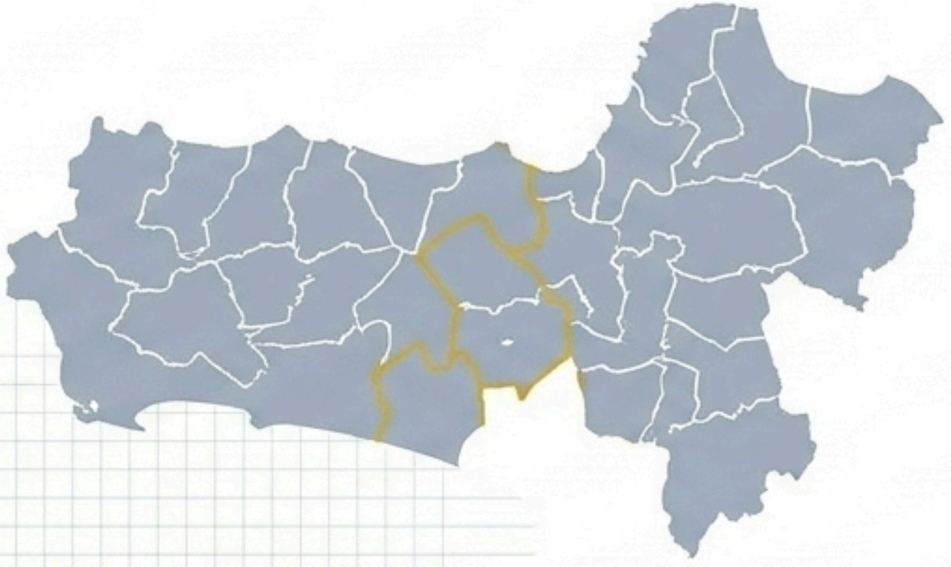

Pengawasan & Regulasi

Dikawal ketat oleh BBPMP & Juknis BOP Jateng (Menjamin layanan bebas pungutan).

Fokus Alokasi

Pemeliharaan sarpras dibatasi maksimal 20%. Prioritas utama pada literasi & numerasi dari Rapor Pendidikan.

Kab. Semarang:
Menerima alokasi BOSP mendekati batas atas.

Kab. Kebumen:
Alokasi disesuaikan daya beli regional.

BOSP Kinerja & Afirmasi (Sistem Reward Mutu)

Tambahan alokasi khusus bagi sekolah dengan kinerja terbaik atau pelaksana Sekolah Penggerak.

Tantangan Lapangan & Mitigasi Taktis

Tantangan: Mentalitas RKAS Copy-Paste tahun lalu.	**Solusi:** Wajib bedah Rapor Pendidikan bersama tim pengembang sebelum input data.
Tantangan: Bukti kuitansi fisik/nota tercecer menghambat pelaporan.	**Solusi:** Manajemen arsip digital ganda (langsung scan ke cloud storage).
Tantangan: Kurangnya pemahaman pajak (PPN/PPh) dalam SIPLah.	**Solusi:** Penunjukan bendahara kompeten & pelatihan pajak berkala.

Analisis SWOT Pengelolaan BOSP Nasional

Strengths (Kekuatan)

Rekor kecepatan pencairan (96% di Januari); Tata kelola terpusat dan transparan via ARKAS.

Weaknesses (Kelemahan)

Literasi pajak dan digital bendahara belum merata; Residu kebiasaan RKAS copy-paste.

Opportunities (Peluang)

Transformasi 16.9T infrastruktur & 2T Smart Classrooms; Rapor Pendidikan memandu ROI anggaran.

Threats (Ancaman)

Disparitas harga barang di daerah terpencil (3T); Beban administratif **tinggi** jika sistem tidak terintegrasi sempurna.

Rekomendasi Strategis Berbasis Data (2025/2026)

Reorientasi Mindset

Geser fokus anggaran dari sekadar barang habis pakai menjadi investasi pada dampak belajar (ROI Pendidikan).

Digitalisasi Holistik

Adopsi penuh SIPLah dan Cloud Storage sekolah untuk menargetkan zero-delay dalam pelaporan.

Advokasi Komisi X

DPR RI terus mengawal pengurangan beban administrasi guru, memastikan dana Rp16,9T + Rp2T tepat sasaran demi mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.